

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Visum et Repertum* memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyidikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polda Bengkulu. Sebagai alat bukti surat yang sah dalam hukum acara pidana, VeR mampu menjadi bukti objektif yang mendukung keterangan korban, khususnya ketika tidak ada saksi mata. VeR menjadi dasar utama bagi penyidik untuk menaikkan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan, serta memberikan landasan ilmiah dan profesional bagi penguatan unsur pidana di persidangan. Dengan sifatnya yang obyektif dan netral, VeR bukan hanya memenuhi syarat hukum formal, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi korban agar hak-haknya dapat ditegakkan secara adil.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi naik atau tidaknya kasus KDRT di Polda Bengkulu sangat kompleks, meliputi aspek teknis maupun sosial. Di antaranya adalah: (1) kurangnya alat bukti terutama tidak adanya *visum et repertum*, (2) pencabutan laporan oleh korban dengan alasan ekonomi, anak, atau tekanan dari keluarga, (3) sikap tidak kooperatif korban yang enggan menjalani pemeriksaan atau visum, serta (4) penyelesaian secara damai di luar jalur hukum akibat tekanan budaya atau sosial. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap KDRT sangat dipengaruhi oleh keberanian

korban, dukungan sosial, serta kecepatan penanganan aparat penegak hukum.

## **B. Saran**

1. Kepada Aparat Penegak Hukum, khususnya Penyidik Unit PPA Polda Bengkulu

Diharapkan agar penyidik dapat lebih proaktif dalam memberikan pendampingan kepada korban KDRT, terutama dalam pengurusan *visum et repertum*. Mengingat pentingnya visum sebagai alat bukti objektif, maka penyidik perlu memastikan bahwa proses permintaan visum dilakukan dengan cepat, tepat, dan mendampingi korban secara langsung ke fasilitas kesehatan. Selain itu, penyidik juga perlu membangun komunikasi yang empatik agar korban merasa aman dan bersedia melanjutkan proses hukum.

2. Kepada Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Disarankan agar dilakukan edukasi hukum secara berkala kepada masyarakat, khususnya perempuan, mengenai pentingnya visum dalam pembuktian KDRT serta hak-hak korban dalam proses hukum. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, agar mereka tidak mudah mencabut laporan akibat tekanan ekonomi atau sosial. Program pemberdayaan perempuan korban kekerasan juga harus diperluas agar mereka memiliki kekuatan untuk memperjuangkan keadilan tanpa ketergantungan terhadap pelaku.